



**DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA
KOTA BATAM**



RENCANA KERJA TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam Tahun 2024 telah selesai disusun sebagaimana berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang kemudian juga dijabarkan lebih lanjut lagi ke dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dengan mengacu RKPD Tahun 2024, Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2021-2026 dan berpedoman pada Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam Tahun 2021-2026, maka dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam yang berisikan program dan kegiatan dalam rangka menunjang pencapaian Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam untuk 1 (satu) tahun.

Demikian dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam 2024 disusun, sebagai acuan semua pihak dalam mewujudkan RPJMD Kota Batam sesuai tahapan yang dilakukan. Besar harapan kami, usul dan saran perbaikan atas Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam 2024, dapat ditampung sejalan dengan perubahan dan dinamika pembangunan Kota Batam yang dinamis dan komprehensif.

Batam, 13 Juli 2023
KEPALA DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA KOTA BATAM



RUDI PANJAITAN, S.STP, M.Si
Pembina Tingkat I
Nip. 19761123 199511 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	4
1.3. Maksud dan Tujuan	7
1.4. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BATAM TAHUN 2022.	9
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Capaian Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam	9
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam	16
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam	17
2.4. Review terhadap Rancangan Akhir RKPD	26
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	34
BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BATAM	35
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	35
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam.....	37
3.3. Program dan Kegiatan	38
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BATAM	46
BAB V PENUTUP	49

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Dan Pencapaian Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam s/d Tahun 2022 (tabel t-c. 29)	1
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam (tabel t-c. 30)	2
Tabel 2.3	Permasalahan, hambatan dan Solusi Tujuan dan sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika kota batam	3
Tabel 2.4	Review terhadap Rancangan Akhir RKPD Tahun 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam (tabel t-c. 31)	4
Tabel 2.5	Usulan Program dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Batam (tabel t-c. 32)	5
Tabel 3.1	Keterkaitan antara tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam dengan visi dan misi Walikota Batam	6
Tabel 3.2	Program dan kegiatan Rancangan Awal RKPD dan Rancangan Akhir RKPD	7
Tabel 3.3	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Pemerintah Kota Batam (tabel t-c. 33)	8
Tabel 4.1	Indikator, Targer dan Pagu Pendanaan.....	9

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.1.1 Pengertian Renja

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam adalah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah (PD) yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan selanjutnya menjadi pedoman bagi Perangkat daerah (PD) dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan selama 1 (satu) tahun.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam sebagai Perangkat Daerah (PD) yang memiliki tugas pokok dan fungsi bidang komunikasi dan informatika, melaksanakan fungsi secara optimal melalui program-program yang telah ditetapkan pada RPJMD Kota Batam, sehingga dapat menyusun target kerja yang akan dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika pada Tahun 2024. Dengan demikian dokumen ini mempermudah bagi Perangkat Daerah (PD) dalam mengukur dan mengevaluasi capaian kinerja yang telah dihasilkan pada tahun sebelumnya, dan mencapai target kinerja pada tahun 2024.

1.1.2 Proses Penyusunan Renja

Proses penyusunan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam dilakukan melalui beberapa proses tahapan yang harus dilalui. Hal ini juga harus disesuaikan dengan dokumen RPJMD yang ada.

Tahapan proses yang harus dilalui adalah sebagai berikut :

- (1). Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam menyusun Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam.
- (2). Penyusunan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam berpedoman pada Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam, hasil evaluasi hasil Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam tahun berjalan.
- (3). Berpedoman pada Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam, bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara

program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam Renja dengan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam.

- (4). Berpedoman pada hasil evaluasi hasil Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam tahun berjalan yang bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam.
- (5). Rancangan Akhir Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam disempurnakan berdasarkan surat edaran Kepala Daerah.
- (6). Penyempurnaan Rancangan Akhir Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran pada Rancangan Akhir RKPD.
- (7). Rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru diajukan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam kepada Kepala Bapelitbangda dalam forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah.
- (8). Penyusunan rancangan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam merupakan proses penyempurnaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah.
- (9). Rancangan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam sebagaimana dimaksud dibahas dan disempurnakan dalam forum perangkat Daerah/lintas perangkat Daerah.
- (10). Bapelitbangda melakukan verifikasi terhadap rancangan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam.

- (11). Verifikasi sebagaimana dimaksud, harus dapat menjamin rancangan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam sudah selaras dengan Rancangan Akhir RKPD.
- (12). Apabila berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud ditemukan hal yang perlu disempurnakan, Bapelitbangda menyampaikan saran dan rekomendasi penyempurnaan rancangan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam kepada Perangkat Daerah.
- (13). Berdasarkan saran dan rekomendasi penyempurnaan sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam menyempurnakan Rancangan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam.
- (14). Rancangan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud disampaikan kembali oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam kepada Kepala Bapelitbangda.
- (15). Setelah verifikasi dilakukan oleh Bapelitbangda dilakukan penetapan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam yang akan menjadi pedoman Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam dalam menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam.

1.1.3. Keterkaitan antara Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam dengan Dokumen lainnya

Rencana Kerja PD mempunyai keterkaitan yang terukur dengan RKPD, RPJMD dan juga memperhatikan RPJPD. Upaya untuk mensinergikan program dan kegiatan pada tahun 2024 diantaranya melalui inventarisasi data, permasalahan dan potensi yang ada. Selain itu juga ada proses penyusunan yang diperoleh dari usulan-usulan pembangunan yang diusulkan oleh masyarakat pada saat pelaksanaan musrenbang tingkat kelurahan, kecamatan dan kota, maupun usulan Perangkat Daerah (PD) terkait melalui forum Perangkat Daerah yang difasilitasi oleh Badan Perencanaan Penelitian Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam.

Pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah (PD) selain guna mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah (PD) juga diharapkan dapat mewujudkan tujuan Perangkat Daerah (PD) yakni VISI Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam yaitu:

“Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis TIK yang Terintegrasi dan Mudah diakses Masyarakat”

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang menjadi dasar penyusunan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-undang Nomor 25 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4738);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42); Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau;
13. Instruksi Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana

- Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
 17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
 18. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024;
 19. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 67);
 20. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
 21. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 108);
 22. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
 23. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 121).
 24. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam Tahun 2021-2041

(Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 119).

25. Peraturan Walikota Batam Nomor 225 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam Tahun 2021-2026;
26. Peraturan Walikota Batam Nomor 65 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Batam Tahun 2024.
27. Peraturan Walikota Batam Nomor 27 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas Dinas Komunikasi Dan Informatika, Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud Penyusunan Renja

Maksud disusunnya Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam adalah :

1. untuk merumuskan rencana kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam untuk periode 1 (satu) tahun sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam.
2. Implementasi tugas dan fungsi serta mandat lainnya di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam.

1.3.2 Tujuan Penyusunan Renja

Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam Tahun 2024 adalah sebagai Pedoman untuk :

1. pelaksanaan program/kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam tahun 2024.
2. monitoring, evaluasi dan pengendalian dalam pelaksanaan program/kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam.
3. penyusunan rencana anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.1.1. Pengertian Renja

- 1.1.2. Proses Penyusunan Renja
 - 1.1.3. Keterkaitan antara Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam dengan Dokumen lainnya
 - 1.2. Landasan Hukum
 - 1.3. Maksud dan Tujuan
 - 1.3.1. Maksud Penyusunan Renja
 - 1.3.2. Tujuan Penyusunan Renja
 - 1.4. Sistematika Penulisan
- BAB II. EVALUASI RENCANA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BATAM TAHUN 2022.
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2022 dan Capaian Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam
 - 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam
 - 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam
 - 2.3.1. Tingkat Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam
 - 2.3.2. Permasalahan dan Hambatan
 - 2.3.3. Peluang dan Tantangan
 - 2.3.4. Isu-Isu Penting/Strategis Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam
 - 2.3.5. Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD
 - 2.3.6. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
- BAB III. TUJUAN DAN SASARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BATAM
- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
 - 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam
 - 3.3. Program dan Kegiatan
- BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BATAM
- BAB V. PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BATAM
TAHUN 2022

**2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Capaian Renstra
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam**

Evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam tahun 2022 dan pencapaian kinerja Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam digunakan untuk mengidentifikasi kemampuan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengetahui realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasi hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Urusan Komunikasi dan Informatika

Urusan Komunikasi dan Informatika diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam dengan alokasi anggaran sebesar Rp 19.553.053.864,00 yang terdiri dari :

- | | | | |
|----------------------------|---|-----|-------------------|
| a. Belanja Barang dan Jasa | : | Rp. | 12.613.621.894,00 |
| b. Belanja Modal | : | Rp. | 138.020.000,00 |
| c. Belanja Pegawai | : | Rp. | 6.801.411.970,00 |

Alokasi anggaran belanja tersebut di atas dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika
Dan Pencapaian Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam s/d Tahun 2022

Tabel T-C. 29

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Program (renstra perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d Tahun 2021	Target dan Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan				
					Target Renja Perangkat Daerah 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah 2022	Tingkat Realisa si		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								
2	16	0 1			Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	16	0 1	2.0 1		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	1 tahun	100%	100%	100%	100%	100%
2	16	0 1	2.0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kegawaian perangkat daerah yang terpenuhi	100%	0	100%	0%	0%	100%	100%
2	16	0 1	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terlaksana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	16	0 1	2.0 7		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Program (renstra perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d Tahun 2021	Target dan Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah 2022	Tingkat Realisa si		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2 16 0 2.0 1 8	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2 16 0 2.0 1 9	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang layak fungsi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2 16 0 2	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	74.59	83	74.59	73.25	98,20%	74.59	100%	
2 16 0 2.0 2 1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan (Persentase) kecamatan yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Program (renstra perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d Tahun 2021	Target dan Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah 2022	Tingkat Realisa si		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2 16 0 3	PROGRAM APLIKASI DAN INFORMATIKA	Nilai Indeks Aspek Kebijakan Internal Tata kelola SPBE; Nilai Indeks Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik; Nilai Indeks Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik	3.00; 3.90; 4.00	83%	3.00; 3.40; 3.00	3.90; 3.60; 3.33	130%; 105,88 %; 111%	3.00; 3.50; 3.16	3.00; 3.50; 3.16	100%; 100%; 100%
2 16 0 2.0 3 1	Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan elektronik yang menggunakan nama domain pemerintah (berdasarkan pemetaan data penilaian kepatuhan standart pelayanan publik 543)	254	100%	234	223	95,30%	244	244	100%
2 16 0 2.0 3 2	Pengelolaan e- government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten	Nilai Aspek Perencanaan Strategis SPBE pada Domain Tata Kelola; Nilai Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Domain Tata Kelola	3.25 ; 3.50	100%	3.25; 3.25	1.25; 3.25	38.46. % ; 100%	3.25; 3.25	3.25; 3.25	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Program (renstra perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d Tahun 2021	Target dan Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan					
					Target Renja Perangkat Daerah 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah 2022	Tingkat Realisa si		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN									
2	21	0 2			PROGRAM PENYELENGGARA AN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi; Tingkat Kematangan Kebijakan Internal	3.00; 3.00	50%	3.00; 3.00	1.00; 5.00	33,33% ; 166,67 %	3.00; 3.00	3.00; 3.00	100%; 100%
2	21	0 2	2.0 1		Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Persandian untuk Pengendalian Keamanan	79,17%	18,10%	45,83%	45,83%	100%	63,75%	63,75%	100%
2	21	0 2	2.0 2		Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat	Persentase Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah yang teramankan	71,43%	28.57	42,86	0	0	57,14%	57,14%	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Program (renstra perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d Tahun 2021	Target dan Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan				
					Target Renja Perangkat Daerah 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah 2022	Tingkat Realisa si		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK								
2	20	0 2			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase OPD yang menggunakan data statistik sektoral dalam perencanaan pembangunan daerah dan evaluasi pembangunan daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	20	0 2	2.0 1		Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di lingkup Pemerintah Daerah	Persentase data statistik sektoral yang tersedia	100%	1 tahun	100%	100%	100%	100%	100%

Berdasarkan tabel 2.1 diatas, dapat dilihat capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terealisasi 100%, akan tetapi pada Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah tidak terealisasi. Hal ini dikarenakan adanya rasionalisasi anggaran di Dinas Komunikasi dan Informatika, sehingga kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan.
2. Program Informasi dan Komunikasi Publik terealisasi 98,20%, hal ini berdasarkan data yang diambil survey di website batam.go.id.
3. Program Aplikasi dan Informatika realisasi pada indikator kinerja melebihi target (diatas 100%), hal ini berdasarkan penilaian dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Sementara di kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah daerah Kabupaten/Kota terealisasi 95,30 %. Hal ini dikarenakan terdapat perubahan peraturan pada tahun 2022 sehingga terdapat pengurangan jenis layanan (11 Jenis Layanan) dan di kegiatan Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten untuk indikator Nilai Aspek Perencanaan Strategis SPBE pada Domain Tata Kelola Cuma teralisasi 38,46% dan untuk indikator Nilai Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Domain Tata Kelola terealisasi 100%. Realisasi target indikator tersebut di keluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
4. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi untuk indikator Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi terealisasi 33,33% dan untuk Indikator Tingkat Kematangan Kebijakan Internal teralisasi 100%. Nilai indikator ini juga dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
5. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoralealisasi 100%, dimana terdapat output buku statistik Sektoralealisasi Kota Batam di Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoralealisasi.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam

Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Batam

Tabel T-C. 30

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target RENSTRA Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan / Analisis
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kot	-	√	74.59%	74.59%	74.59%	74.59%	73.25%	-	74.59%	74.59%	
Cakupan (Persentase) kecamatan yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik	-	√	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	
Nilai Indeks Aspek Kebijakan Internal Tata kelola SPBE; Nilai Indeks Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik; Nilai Indeks Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik	-	-	3.00; 3.40; 3.00	3.00; 3.50; 3.16	3.00; 3.90; 4.00	3.00; 4.00; 4.00	3.90; 3.60; 3.33	-	3.00; 3.90; 4.00	3.00; 4.00; 4.00	
Jumlah layanan elektronik yang menggunakan nama domain pemerintah (berdasarkan pemetaan data penilaian kepatuhan standart pelayanan publik 543)	-	-	234	244	254	264	233	-	254	264	
Nilai Aspek Perencanaan Strategis SPBE pada Domain Tata Kelola; Nilai Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Domain Tata Kelola	-	-	3.25; 3.25	3.25; 3.25	3.25; 3.50	3.25; 3.25	1.25; 3.25	-	3.25; 3.25	3.25; 3.25	
Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi; Tingkat Kematangan	-	-	3.00; 3.00	3.00; 3.00	3.00; 3.00	3.00; 3.00	1.00; 5.00	-	3.00; 3.00	3.00; 3.00	

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target RENSTRA Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan / Analisis
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi											
Persentase Penyelenggaraan Persandian untuk Pengendalian Keamanan	-	-	45.83%	63.75%	79.17%	85.83%	45.83%	-	79.17%	85.83%	
Persentase Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah yang diamankan	-	√	42.86%	57.14%	71.43%	85.71%	0 %	-	71.43%	85.71%	
Persentase OPD yang menggunakan data statistik sektoral dalam perencanaan pembangunan daerah dan evaluasi pembangunan daerah	-	√	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	
Persentase data statistik sektoral yang tersedia	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas

Komunikasi dan Informatika Kota Batam

2.3.1. Tingkat Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam

Tingkat Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam dapat dilihat berdasarkan Perjanjian Kinerja. Hal itu dapat dilihat juga dari target dan realisasi sasaran dan indikator Kinerja yang ada di Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam Tahun 2021-2026, seperti pada tabel T-C. 30 diatas.

2.3.2. Permasalahan dan Hambatan

Permasalahan dan Hambatan dalam pencapaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3.

Permasalahan, hambatan dan Solusi Tujuan dan sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika kota batam

RPJMD Kota Batam 2021-2026		Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam		Permasalahan	Solusi
Pokok Visi	Misi	Tujuan	Sasaran		
"Madani", "Modern"	Misi 5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Responsif, Efektif dan Efisien berbasis teknologi informasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat	"Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi"	1. Meningkatkan kualitas kebijakan, tata kelola, manajemen, dan layanan SPBE;	1. Belum adanya pedoman pelaksanaan serta SK Tim Pelaksana Domain Manajemen dan Domain Audit TIK SPBE yang dapat membuat capaian nilai evaluasi SPBE Tahun 2023 rendah	1. Membuat draft pedoman pelaksanaan serta SK Tim Pelaksana Domain Manajemen dan Domain Audit TIK SPBE 2. Mengusulkan anggaran Jasa Konsultan untuk membuat Dokumen Pedoman Pelaksanaan Domain Manajemen dan Domain Audit TIK SPBE
			2. Meningkatkan kualitas layanan informasi dan komunikasi publik;	2. Sistem Jaringan Intra Pemerintah belum terintegrasi ke semua OPD	Melakukan koordinasi bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)
				3. Formasi SDM Tenaga Ahli TIK belum terisi 100% karena belum menemukan kandidat yang memenuhi kualifikasi teknis sesuai KAK	Memberdayakan ASN dan tenaga ahli yang ada
				4. Beberapa permintaan pengembangan aplikasi dari OPD tidak sesuai dengan target yang ada di Arsitektur SPBE dan Masterplan Smartcity	Menggeser jadwal pengembangan aplikasi berdasarkan prioritas
				5. Belum semua OPD mengembangkan aplikasi sesuai SOP	Sosialisasi SOP melalui surat resmi dan website

RPJMD Kota Batam 2021-2026		Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam		Permasalahan	Solusi
Pokok Visi	Misi	Tujuan	Sasaran		
				6.	
				7. Survey Kepuasan Pengguna terhadap layanan pengembangan aplikasi belum terlaksana	Melaksanakan Survey Kepuasan pada Semester II Tahun 2023
				8. Tidak maksimalnya sosialisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) terhadap PPID Pelaksana yang terdapat di setiap Organisasi Perangkat Daerah. Dimana dalam sosialisasi ini mendatangkan tenaga ahli dan narasumber dari Kementerian Dalam Negeri dan Komisi Informasi. Selain dari itu juga kurangnya pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi terhadap layanan SP4N LAPOR !	Peningkatan jumlah pelaksanaan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis untuk pelaksanaan PPID dan SP4N LAPOR!
				9. Terjadi keterlambatan pelayanan dari beberapa organisasi perangkat daerah karena adanya pergantian pejabat dan staf admin yang bertugas mengelola aplikasi PPID dan SP4N LAPOR!	Melakukan bimbingan dan pelatihan kepada pejabat dan admin pengelola aplikasi organisasi perangkat daerah secara berkala, terutama setelah adanya mutasi dan pergantian pejabat
				10. Belum maksimalnya kompetensi dan sumber daya manusia di persandian terkait ilmu-ilmu teknis di persandian seperti pengamanan kriptografi dalam pengiriman informasi, dan lain lain.	Mengajukan usulan rencana anggaran untuk mengikuti bimbingan teknis dan pelatihan persandian dan keamanan informasi.

RPJMD Kota Batam 2021-2026		Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam		Permasalahan	Solusi
Pokok Visi	Misi	Tujuan	Sasaran		
				11. Belum selesainya Perjanjian Kerjasama dengan Pihak Politeknik Negeri Batam dan Badan Sertifikat Elektronik dan BSSN dikarenakan adanya aturan atau kebijakan terkait kerjasama dengan pihak ketiga di lingkungan Pemerintah Kota Batam	Berkoordinasi dengan Bagian Kerjasama dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Batam
				12. Belum dilaksanakannya audit Kepatuhan Keamanan Informasi untuk memberikan rekomendasi perbaikan kebijakan dan prosedur guna meningkatkan keamanan informasi di lingkungan Pemerintah Kota Batam sesuai dengan hasil audit yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam.	Membuat pedoman audit TIK sesuai standar SPBE dan menyusun tim audit.
				13. Belum maksimalnya pemahaman ASN Pemko Batam terkait dengan Keamanan Informasi.	Penyelenggaraan sosialisasi secara berkala.
				14. Belum maksimalnya pemanfaatan sertifikat elektronik (tanda tangan elektronik) pada aplikasi internal Pemerintah Kota Batam	Sosialisasi kepada seluruh Perangkat Daerah terkait pemanfaatan sertifikat elektronik (tanda tangan elektronik) pada aplikasi internal.

RPJMD Kota Batam 2021-2026		Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam		Permasalahan	Solusi
Pokok Visi	Misi	Tujuan	Sasaran		
				15. Sering terjadinya Prank Call dan Ghost Call	Sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya NTPD 112
				16. Kurang aktifnya pemangku kepentingan antara lain kelompok informasi masyarakat, kelompok media tradisional, pembuatan konten positif dan kelompok strategi	Melakukan pertemuan secara berkala dengan pemangku kepentingan antara lain kelompok informasi masyarakat, kelompok media tradisional, pembuatan konten positif dan kelompok strategi
				17. Penyelenggaraan Forum Satu Data Tingkat Kota Batam belum berjalan berkelanjutan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan Perangkat Daerah serta Instansi vertikal yang ada di daerah melalui Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kota Batam; 2. Mengusulkan anggaran untuk melaksanakan kegiatan Forum Satu Data secara berkelanjutan
				18. Belum maksimalnya kompetensi dan sumber daya manusia di bidang statistik	Mengajukan usulan rencana anggaran untuk mengikuti pelatihan, diklat maupun bimtek di Bidang Statistik.
				19. Kurangnya formasi ASN yang berlatar belakang pendidikan ilmu statistik	Mengusulkan formasi kebutuhan ASN yang berlatar belakang pendidikan ilmu statistik ke BKPSDM Kota Batam.

RPJMD Kota Batam 2021-2026		Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam		Permasalahan	Solusi
Pokok Visi	Misi	Tujuan	Sasaran		
				20. Penyusunan metadata statistik sektoral belum dilakukan secara optimal	Mengusulkan anggaran untuk melaksanakan kegiatan pembangunan metadata statistik sektoral
				21. Kegiatan survey statistik sektoral terkait persentase masyarakat yang mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah belum pernah dilakukan;	1. Mengusulkan anggaran untuk melaksanakan kegiatan survey statistik sektoral terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah, bekerjasama dengan tenaga profesional 2. Mengadakan survey mandiri secara online
				22. Belum terlaksananya pers gathering untuk wadah komunikasi dengan media dan wartawan	penambahan anggaran untuk pers gathering
				23. belum adanya strakom bidang kehumasan	perekrutan tenaga ahli yang mampu menyusun strakom bidang kehumasan
				24. masih sedikitnya masyarakat yang mengetahui pemberitaan di website dan media sosial media center	melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait media sosial dan website media center
				25. pengiriman photo dan video untuk pemberitaan masih lama karena menunggu photographer dan/atau videographer balik ke kantor	Mengajukan usulan rencana anggaran pembelian peralatan kehumasan yang menggunakan teknologi terbaru
				26. Belum maksimalnya kompetensi dan sumber daya manusia di bidang Kehumasan	Mengajukan usulan rencana anggaran untuk mengikuti pelatihan, diklat maupun bimtek di Bidang kehumasan.

RPJMD Kota Batam 2021-2026		Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam		Permasalahan	Solusi
Pokok Visi	Misi	Tujuan	Sasaran		
				27. Belum adanya regulasi yang mengatur kerjasama media kehumasan	Membuat regulasi pelaksanaan kerjasama media dan pemerintah kota batam
				28. Banyaknya beredar berita hoax di masyarakat yang diperoleh dari berbagai media, terutama media sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan verifikasi berita yang bersifat hoax yang beredar di masyarakat 2. Memberikan sosialisasi melalui konten(video, pamflet, flyer) di berbagai media agar masyarakat lebih bijak dalam menyebarkan berita, agar berita yang belum jelas kebenarannya(bersifat hoax) tidak disebarluaskan 3. Memberikan sosialisasi melalui konten(video, pamflet, flyer) di berbagai media agar masyarakat juga dapat membantu memverifikasi berita hoax yang tersebar di berbagai media, terutama media sosial agar jangan disebarluaskan

2.3.3. Peluang dan Tantangan

Dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan Diskominfo, perlu mengetahui dinamika tantangan dan peluang yang ada guna mempertajam kebijakan pelayanan Diskominfo untuk mendukung pencapaian target dan sasaran RPJMD.

1. Tantangan

- a. Kesenjangan informasi di masyarakat di Kota Batam;
- b. Pesatnya perkembangan TIK;
- c. Ketersediaan Infrastruktur TIK yang belum merata di Kota Batam;
- d. Terbatasnya pemahaman aparat dan masyarakat Kota Batam terhadap TIK;
- e. Data statistik sektoral yang terintegrasi melalui Single Data Sistem dan Buku Statistik Sektoral;
- f. Peningkatan kapasitas kelembagaan Pemerintah Kota Batam melalui pemanfaatan persandian dan peningkatan kualitas keamanan informasi

2. Peluang

- a. Kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan publik Kota Batam berbasis teknologi informasi;
- b. Kebutuhan pengembangan muatan e-Government sesuai karakteristik daerah di Kota Batam;
- c. Kesadaran masyarakat Kota Batam akan pentingnya data, informasi dan komunikasi;
- d. Kebutuhan pengembangan TIK dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kota Batam berbasis elektronik;

2.3.4. Isu-Isu Penting/Strategis Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam

Isu-isu yang penting dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam dapat tergambarkan melalui isu strategis yaitu kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam kinerja dan pelayanan karena dampaknya yang signifikan di masa depan. Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu strategis Diskominfo Pemerintah Kota Batam yaitu :

1. Rencana induk, Arsitektur dan kebijakan SPBE yang berperan atas perencanaan, anggaran, penyelarasan, penyiapan, implementasi dan evaluasi SPBE di Pemerintah Daerah belum maksimal menjadi salah satu dokumen acuan Pelaksanaan Pengembangan SPBE di Lingkungan Pemerintah Kota Batam.
2. Belum optimalnya fasilitas teknologi informasi dalam mendukung pelayanan publik;
3. Belum maksimal pemahaman serta kesadaran keamanan informasi dan pemanfaatan persandian daerah;
4. Pengelolaan penyelenggaraan sistem jaringan intra dan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah yang belum terintegrasi di Dinas Komunikasi dan Informatika dan Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kota Batam seperti akses internet dan infrastruktur pendukungnya;
5. Pengumpulan dan Pengelolaan data statistik sektoral di lingkungan Pemko Batam belum belum terlaksana secara optimal;
6. Kerjasama antar instansi dan diseminasi data statistik sektoral belum terlaksana secara optimal.

2.4. Review terhadap Rancangan Akhir RKPD

Review Rancangan Akhir RKPD dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.4.

Review terhadap Rancangan Akhir RKPD Tahun 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Batam

Tabel T-C. 31

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	BATAM	Presentase Administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	100 %	9,031,083,850	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	BATAM	Presentase Administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	100 %	9.114.528.244	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	BATAM	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100 %	7,870,487,683	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	BATAM	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100 %	7.973.108.292	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	BATAM	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat	100 %	68,554,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	BATAM	-	-	0	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Daerah yang terpenuhi								
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	BATAM	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terlaksana	100 %	231,286,227	Administrasi Umum Perangkat Daerah	BATAM	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terlaksana	100%	302.373.256	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	BATAM	Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	100 %	476,963,500	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	BATAM	Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	100%	374.015.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BATAM	Persentase kebutuhan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100 %	94,645,440	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BATAM	Persentase kebutuhan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100%	94.046.696	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BATAM	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi	100 %	289,165,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BATAM	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi	100%	370.985.000	
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	BATAM	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	74.59 %	8.309.786.536	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	BATAM	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	74.59 %	11.980.905.454	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	BATAM	Cakupan (Persentase) kecamatan yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik	100%	8.309.786.536	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	BATAM	Cakupan (Persentase) kecamatan yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik	100%	11.980.905.454	
	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA		Nilai Indeks Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE Nilai Indeks Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik Nilai Indeks Aspek	3.00 Indeks 3.50 Indeks 3.16 Indeks	6.321.790.500	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA		Nilai Indeks Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE Nilai Indeks Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik Nilai Indeks Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik	3.00 Indeks 3.90 Indeks 4.00 Indeks	7.110.131.695	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah layanan elektronik yang menggunakan nama domain pemerintah (berdasarkan pemetaan data penilaian kepatuhan standart pelayanan publik 543)	244 layanan	2.075.450.500	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah layanan elektronik yang menggunakan nama domain pemerintah	254 layanan elektronik	2.094.645.973	
	Pengelolaan E government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Nilai Aspek Perencanaan Strategis SPBE pada Domain Tata Kelola	3.25 Indeks 3.25 indeks	4.246.340.000	Pengelolaan E government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Nilai Aspek Perencanaan Strategis SPBE pada Domain Tata Kelola	3.25 Indeks 3.50 indeks	5.015.485.722	
	PROGRAM PENYELENGGARAN STATISTIK SEKTORAL	BATAM	Persentase OPD yang menggunakan data statistik sektoral dalam	100%	207.120.000	PROGRAM PENYELENGGARAN STATISTIK SEKTORAL	BATAM	Persentase OPD yang menggunakan data statistik sektoral dalam	100 %	307.115.750	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			perencanaan pembangunan daerah dan evaluasi pembangunan daerah					perencanaan pembangunan daerah dan evaluasi pembangunan daerah			
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	BATAM	Persentase data statistik sektoral yang tersedia	100%	207.120.000	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	BATAM	Persentase data statistik sektoral yang tersedia	100%	307.115.750	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	PROGRAM PENYELENGGAR AAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	BATAM	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	3 Level 3 Level	108.452.174	PROGRAM PENYELENGGAR AAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	BATAM	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	3 Level 3 Level	113.158.500	
	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	BATAM	Persentase Penyelenggaraan Persandian untuk Pengendalian Keamanan Informasi Pemda	63.75 %	101.085.174	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	BATAM	Persentase Penyelenggaraan Persandian untuk Pengendalian Keamanan Informasi Pemda	79.17 %	113.158.500	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	BATAM	Persentase Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah yang teramankan		7.367.000		BATAM	-	-	0	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Renja, salah satu yang menjadi bahan penyusunan adalah usulan masyarakat. Akan tetapi, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam merupakan salah satu Perangkat Daerah yang tidak mendapatkan usulan masyarakat pada pelaksanaan Musrenbang, baik tingkat Kelurahan, Kecamatan maupun tingkat Kota Batam.

Musrenbang yang telah dilalui ketika pembahasan tentang Dinas Komunikasi dan Informatika cuma membahas tentang hal-hal yang tidak lagi menjadi kewenangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam seperti pertanyaan tentang sinyal Operator seluler, sinyal internet dan permasalahan tower BTS (Base Transceiver Station).

Tabel 2.5.

Usulan Program dan Kegiatan
Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Batam

Tabel T-C. 32

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1.	N I H I L				

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BATAM

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Kementerian Komunikasi dan Informatika mengumumkan persiapan 5 (lima) program prioritas guna mendukung percepatan transformasi digital di Indonesia, sehingga mendorong masyarakat Tanah Air menjadi masyarakat digital.

Kelima program tersebut terdiri dari:

1. Program Penyediaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK);

Program ini mempunyai sasaran strategis sebagai berikut :

1. Meningkatnya cakupan jaringan pita lebar yang cepat dan terjangkau
2. Meningkatnya cakupan wilayah yang terlayani penyiaran digital
3. Meningkatnya konektivitas layanan pos
4. Terwujudnya konektivitas Next Generation Broadband Nasional

2. Program Pengelolaan Spektrum Frekuensi, Standar Perangkat dan Layanan Publik

Program ini mempunyai sasaran strategis *“Meningkatnya pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan kualitas pengelolaan layanan publik bidang pos, telekomunikasi dan informatika”*

3. Program Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

Program ini mempunyai sasaran strategis sebagai berikut :

1. Meningkatnya pemanfaatan TIK di sektor ekonomi dan bisnis
2. Terwujudnya masyarakat yang cerdas digital
3. Dukungan implementasi digitalisasi pemerintah

4. Program Komunikasi Publik

Program ini mempunyai sasaran strategis *“Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik”*

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud. yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan

prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

Dalam Urusan Komunikasi dan Informatika, kebijakan tentang pentingnya penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di lingkungan pemerintahan, baik pusat maupun daerah telah yang tiap tahunnya dievaluasi oleh oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) melalui Sistem Pemerintah Berbasis Eletronik (SPBE) yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel. Evaluasi SPBE merupakan proses penilaian terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah dalam hal ini Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 59 tahun 2020 bahwa lingkup pelaksanaan SPBE ada pada 4 domain. Domain tersebut antara lain domain kebijakan (aspek kebijakan tata kelola dan aspek kebijakan pelayanan), domain tata kelola (aspek kelembagaan, Aspek strategi dan perencanaan dan aspek TIK) dan domain layanan (aspek administrasi pemerintah dan aspek pelayanan publik). Pemanfaatan TIK dalam Dinas Komunikasi dan Informatika meliputi infrastruktur jaringan, aplikasi dan keamanan informasi. Untuk meningkatkan sistem pemerintahan berbasis elektronik diperlukan keterpaduan antar stakeholder dalam mewujudkan sebuah tata kelola yang yang efektif.

Jaringan intranet Pemerintah Kota Batam pada tahun 2023 menjangkau 3 lokasi. Perangkat Daerah yang terhubung ke jaringan intra pemerintah Kota Batam menggunakan media fiber optik sebanyak 14 perangkat daerah, selain itu Mesjid Agung Batam Center juga dilayani Pemerintah Kota Batam. Akan tetapi masih ada Perangkat Daerah yang masih belum terhubung ke jaringan intra Pemerintah Daerah, yaitu daerah perkantoran di wilayah Sekupang, wilayah Kecamatan dan kelurahan, dan wilayah hinterland.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam membangun interaksi antara Pemerintah dengan masyarakat untuk penyerapan aspirasi publik melalui email, telepon, media sosial. Selain itu Dinas

Komunikasi dan Informatika Kota Batam juga mempunyai Sistem Pelayanan Publik Nasional (SP4N), dan sesuai dengan ketentuan dari KemenPAN RB dan telah menunjuk Dinas Komunikasi Daerah Kota Batam sebagai user admin ditingkat Pemerintah Kota Batam.

Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Batam juga mempunyai media center yang dapat digunakan pihak media (pers) sebagai mitra Pemerintah Kota Batam dalam menyampaikan informasi publik.

Dalam penyebaran informasi di Kota Batam mempunyai tantangan tersendiri, hal ini dikarenakan belum semua daerah terjangkau sarana informasi yang memadai. Melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam dalam membangun akses komunikasi dan informasi ke wilayah hinterland berbagai kegiatan dilaksanakan oleh Pemerintah, seperti Musrenbang, kegiatan perlombaan-perlombaan, baik yang dilakukan oleh Dekranasda Kota Batam, Diskominfo Kota Batam, maupun Perangkat Daerah lainnya.

Dalam Urusan Persandian dan Keamanan, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam bersama BSSN rutin melaksanakan kegiatan Kontra Penginderaan di Pemerintah Kota Batam. Selain itu juga telah diterapkan Tanda Tangan Elektrik (TTE) di Pemerintah Kota Batam. Selain itu menjaga keamanan dan informasi, hal ini juga untuk mempermudah pelayanan yang ada di Pemerintah Kota Batam.

Dalam Urusan Statistik, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam setiap tahun selalu menerbitkan Buku Statistik Sektorial. Buku tersebut dapat digunakan oleh Pemerintah maupun swasta untuk acuan data statistik di Kota Batam. Selain itu Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam juga bermitra dengan BPS agar data statistik yang ada di Kota Batam mempunyai tingkat kehandalan yang baik dan nilai margin error yang kecil.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam

Tujuan Pembentukan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam

Tujuan Pembentukan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam adalah:

“Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi”

Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam

Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas kebijakan, tata kelola, manajemen, dan layanan SPBE;
2. Meningkatnya kualitas layanan informasi dan komunikasi publik;

Keterkaitan antara tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam dengan visi dan misi Walikota Batam dapat dilihat dalam Tabbel berikut :

Tabel 3.1.

Keterkaitan antara tujuan dan sasaran
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam
dengan visi dan misi Walikota Batam

RPJMD Kota Batam 2021-2026		Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam	
Pokok Visi	Misi	Tujuan	Sasaran
"Madani", "Modern"	Misi 5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Responsif, Efektif dan Efisien berbasis teknologi informasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat	"Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi"	1. Meningkatnya kualitas kebijakan, tata kelola, manajemen, dan layanan SPBE; 2. Meningkatnya kualitas layanan informasi dan komunikasi publik;

3.3. Program dan Kegiatan

Dalam mencapai tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika, maka ditetapkan 5 (lima) program dan 10 kegiatan yang penyebaran lokasi kegiatannya dilaksanakan di Kota Batam, baik Mainland, maupun Hinterland. Hal ini karena Dinas Komunikasi dan Informatika bersifat mendukung kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Batam, baik secara publikasi maupun secara teknologi yang digunakan.

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, didukung 5 kegiatan :

1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
2. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;

3. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
 4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
 5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
- B. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, didukung 1 kegiatan :
1. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- C. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika, didukung 2 kegiatan :
1. Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 2. Kegiatan Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah.
- D. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral, didukung 1 kegiatan :
1. Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota.
- E. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi, didukung 1 kegiatan :
1. Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

Dalam perencanaan Program dan Kegiatan terdapat perbedaan dalam tahapan Rancangan Awal RKPD dan tahapan Rancangan Akhir RKPD. Perubahan usulan tersebut dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 3.2.

Program dan kegiatan Rancangan Awal RKPD dan Rancangan Akhir RKPD

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif Rancangan Awal (Rp.)	Pagu Indikatif Rencana Kerja (Rp.)	Keterangan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9,031,083,850	9.114.528.244	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7,870,487,683	7.973.108.292	Perubahan pagu indikatif berdasarkan hitungan realisasi gaji
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	68,554,000	0	Kegiatan dihapuskan dikarenakan rasionalisasi menyesuaikan proyeksi pendapatan tahun 2024

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif Rancangan Awal (Rp.)	Pagu Indikatif Rencana Kerja (Rp.)	Keterangan
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	231,286,227	302.373.256	Perubahan pagu indikatif berdasarkan hitungan realisasi kebutuhan
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	476,963,500	374.015.000	Pengurangan Pagu Indikatif dikarenakan rasionalisasi menyesuaikan proyeksi pendapatan tahun 2024
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	94,645,440	94.046.696	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	289,165,000	370.985.000	Perubahan pagu indikatif berdasarkan hitungan realisasi kebutuhan
2	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	8.309.786.536	11.980.905.454	
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	8.309.786.536	11.980.905.454	Perubahan pagu indikatif berdasarkan hitungan realisasi kebutuhan
3	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	6.321.790.500	7.110.131.695	
	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.075.450.500	2.094.645.973	Perubahan pagu indikatif berdasarkan hitungan realisasi kebutuhan
	Pengelolaan E government di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	4.246.340.000	5.015.485.722	Perubahan pagu indikatif berdasarkan hitungan realisasi kebutuhan
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	207.120.000	307.115.750	
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	207.120.000	307.115.750	Perubahan pagu indikatif berdasarkan hitungan realisasi kebutuhan
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	108.452.174	113.158.500	
	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	101.085.174	113.158.500	Perubahan pagu indikatif berdasarkan hitungan realisasi kebutuhan
	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	7.367.000	0	Kegiatan dihapuskan dikarenakan rasionalisasi menyesuaikan proyeksi pendapatan tahun 2024

Tabel 3.2.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Pemerintah Kota Batam
 Nama Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam

Tabel T-C. 33

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2025			
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
2.	16.	03			Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	1.Nilai Indeks Aspek Kebijakan Internal Tata kelola SPBE;	Batam	3.00	7.110.131.695	APBD		4.00	6.563.179.000		
						2.Nilai Indeks Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik								3.90	3.00
						3.Nilai Indeks Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik								4.00	5.00
2.	16.	03.	2.	01	Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain DiLingkup Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan elektronik yang menggunakan nama domain pemerintah (Berdasarkan pemetaan data penilaian kepatuhan standart pelayanan publik 543)	Batam	254	2.094.645.973	APBD		274	2.268.508.000		

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.	16.	03.	2.	02	Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	1. Nilai Aspek Perencanaan Strategis SPBE pada Domain Tata Kelola	Batam	3.25	5.015.485.722	APBD		3.25	4.294.671.000
						2. Nilai Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Domain Tata Kelola		3.50				4.00	
2.	21.	02			Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	Batam	3.00	113.158.500	APBD		3.00	111.226.009
						Tingkat Kematangan Kebijakan Internal		3.00				3.00	
2.	21.	02.	02.	01	Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	Persentase Penyelenggaraan Persandian untuk Pengendalian Keamanan Informasi Pemda	Batam	79,17%	113.158.500	APBD		100%	102.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.	20.	2			Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase OPD yang menggunakan data statistik sektoral dalam perencanaan pembangunan daerah dan evaluasi pembangunan daerah	Batam	100%	307.115.750	APBD		100%	214.493.472
2.	20.	02.	2.	01	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase data statistik sektoral yang tersedia	Batam	100%	307.115.750	APBD		100%	214.493.472
2.	16.	02			Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Batam	74,59%	11.980.905.454	APBD		74,59%	8.625.451.061

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.	16.	02.	2.	01	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan (Persentase) Kecamatan yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik	Batam	100 %	11.980.905.454	APBD		100 %	8.625.451.060
2.	16.	01			Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	Batam	100%	9.114.528.244	APBD		100%	10.885.278.870
2.	16.	01.	2.	02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	Batam	100%	7.973.108.292	APBD		100%	9.430.042.064
2.	16.	01.	2.	06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terlaksana	Batam	100%	302.373.256	APBD		100%	252.713.031

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.	16.	01.	2.	07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kebutuhan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi	Batam	100%	374.015.000	APBD		100%	783.123.749
2.	16.	01.	2.	08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	Batam	100%	94.046.696	APBD		100%	103.421.625
2.	16.	01.	2.	09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang layak fungsi	Batam	100%	370.985.000	APBD		100%	315.978.401

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BATAM

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam mengampu Urusan Unsur Wajib bukan Pelayanan Dasar Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian. Program-program Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam pada Tahun 2024 mendukung prioritas pembangunan “Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat” sebagaimana tertuang pada RPJMD Kota Batam Tahun 2021-2026. Adapun Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Tabel 4.1.
 Indikator, Targer dan Pagu Pendanaan

Uraian/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2024	Pagu Pendanaan 2024 (Rp)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	100 %	9.114.528.244,00
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100 %	7.973.108.292,00
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terlaksana	100 %	302.373.256,00
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kebutuhan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi	100 %	374.015.000,00
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	100 %	94.046.696,00
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang layak fungsi	100 %	370.985.000,00

Uraian/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2024	Pagu Pendanaan 2024 (Rp)
Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	74,59 %	11.980.905.454,00
Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan (Persentase) kecamatan yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik	100 %	11.980.905.454,00
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	1. Nilai Indeks Aspek Kebijakan Internal Tata kelola SPBE; 2. Nilai Indeks Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik; 3. Nilai Indeks Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik	1. 3,00 2. 3,90 3. 4,00	7.110.131.695,00
Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkungan Pemerintah Daerah	Jumlah layanan elektronik yang menggunakan nama domain pemerintah (berdasarkan pemetaan data penilaian kepatuhan standart pelayanan publik 543)	254 layanan	2.094.645.973,00
Kegiatan Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah	- Nilai Aspek Perencanaan Strategis SPBE pada Domain Tata Kelola - Nilai Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Domain Tata Kelola	3,25 3,50	5.015.485.722,00
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase OPD yang menggunakan data statistik sektoral dalam perencanaan pembangunan daerah dan evaluasi pembangunan daerah	100 %	307.115.750,00

Uraian/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2024	Pagu Pendanaan 2024 (Rp)
Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase data statistik sektoral yang tersedia	100 %	307.115.750,00
Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	1. Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi 2. Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi	1. 3,00 2. 3,00	113.158.500,00
Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Persandian untuk Pengendalian Keamanan Informasi Pemda	79,17 %	113.158.500,00
Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah yang teramankan	0	0
TOTAL			28.625.839.643,00

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam dilaksanakan setiap tahun yang merupakan titik awal pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam yang digunakan sebagai pedoman dalam mencapai capaian kinerja sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD 2016-2021. Dokumen Renja memuat kebijakan, program, kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun melalui Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam adalah tindak lanjut pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (PD) dalam hal ini Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Penyusunan Rencana Kerja tahun 2024 mengacu pada hasil evaluasi program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam pada tahun sebelumnya, sehingga diharapkan dapat menjadi masukan dan saran perbaikan dalam menyusun program dan kegiatan prioritas di tahun yang akan datang.

Dalam penyusunan Rencana Kerja ini masih membutuhkan saran, masukan, kritikan yang bisa memperbaiki pembuatan Renja Perangkat Daerah (PD) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam yang lebih baik dan lebih bermanfaat kedepannya.

Batam, 13 Juli 2023

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KOTA BATAM



RUDI PANJAITAN, S.STP,M.Si

Pembina Tingkat I

Nip. 19761123 199511 1 002